



PANITIA KERJA (PANJA)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018

BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
(BKSAP DPR RI)





PANITIA KERJA (PANJA)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018

BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
(BKSAP DPR RI)





Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



PANITIA KERJA (PANJA)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018

BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
(BKSAP DPR RI)





PANITIA KERJA (PANJA)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018

© Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI 2019

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen. Lebih lanjut lihat www.dpr.go.id.

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional
Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara III Lantai 6 Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta 10270 Indonesia

Telepon +6221 571 5813, 571 5835, 571 5837, 571 5841

Faks +6221 573 2132

E-mail biro_ksap@dpr.go.id

Website wpfsd.org
dpr.go.id

Koordinator Tim : Endah T. D. Retnoastuti

Tim Pendamping : Arief Rahman Hakim, Anissa Mariana, Mochamad Ilyas,
Dr. Humprey Wangke, Lisbet, Rizki Roza

Tim Teknis : Chairil Patria, Endang Dwi Astuti, Haryanti, Miranti Widiani,
Hikmah, Hery Prasetyo, Renaldi Setiawan, Miftahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

x + 66 halaman ; 210 mm x 280 mm



Chair of WPFSD bersama Pimpinan DPR RI pada sidang The 2nd WPFSD



DAFTAR ISI



vi	Daftar Isi
vii	Kata Pengantar
1	Anggota Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018
5	Rekomendasi Tahun 2018 untuk Pemerintah dan untuk DPR RI
11	Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tahun 2018 untuk Nasional dan Internasional
25	Kegiatan Panja TPB di Tahun 2018
35	Best Practices
49	Selayang Pandang TPB
59	Galeri Foto



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



*Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

SEJAK DISEPAKATINYA Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/TPB*) pada 2015 silam, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia senantiasa berupaya untuk mendorong dan memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tanah air melalui Panitia Kerja (Panja) TPB. Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing.

Pada kesempatan ini, saya juga memberikan penghargaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang sangat responsif dalam menghubungkan ke 17 *goals* dan 169 target TPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang selanjutnya dijabarkan pula dalam *roadmap* Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat bagi struktur dan mekanisme tata kelola TPB secara nasional.



Naiknya peringkat Indonesia pada index *SDGs Global* tahun 2018 juga patut diapresiasi. *SDGs Index and Dashboard Report 2018* mencantumkan bahwa pencapaian TPB di Indonesia sudah berjalan sesuai target (*on track*). Namun demikian, masih ada beberapa *goal* yang perlu dikelola dengan lebih baik lagi untuk mencapai target 2030, yaitu pendidikan berkualitas (*Goal 4*), kesetaraan gender (*Goal 5*), serta kota dan permukiman yang berkelanjutan (*Goal 11*).

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan sangat bergantung pada 3 (tiga) faktor utama, yaitu **percepatan, pembiayaan** dan **inklusi**. Aspek “percepatan” diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten agar dapat mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah. Percepatan juga diperlukan untuk pengumpulan data yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian TPB secara kredibel.

Aspek “pembiayaan” seringkali dipandang sebagai kendala utama dalam mencapai TPB. Sejatinya, diperlukan pergeseran fundamental terhadap perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu bukan sebagai beban atau tantangan yang harus dihadapi, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Kunci pencapaian TPB terletak pada diversifikasi arus keuangan dan transparansi investasi. Saya menghargai berbagai inisiatif yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk penerbitan Sukuk Hijau oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk membentuk Dana Sumber Daya Alam pertama di Indonesia.

TPB adalah satu-satunya komitmen global yang menjamin hak setiap individu untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki. Oleh karena itu, aspek “inklusi” harus menjadi prinsip utama dalam perumusan berbagai kebijakan terkait TPB. Selain konsultasi, diperlukan pula serangkaian *platform* baik di tingkat nasional maupun daerah, yang dapat mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah, legislator, penanam modal, sektor swasta, filantropi, masyarakat madani dan akademisi, dalam mekanisme kemitraan yang konkret. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena masing-masing *stakeholder* memiliki peranan dan kontribusi yang berbeda terhadap tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal ini, BKSAP DPR-RI sangat mendukung keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program-program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah.



Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga harus diupayakan dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan di setiap negara, selaras dengan cita-cita TPB untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan (*no one is left behind*). Hal inilah yang akan terus dilaksanakan oleh BKSAP DPR RI, yaitu membangun kesadaran semua pihak untuk bergandengan tangan dalam mempromosikan dan mendorong pencapaian TPB secara menyeluruh.

Melalui Buku Rekomendasi ini, BKSAP DPR RI berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas Alat Kelengkapan Dewan secara transparan dan profesional. Selain memberikan serangkaian rekomendasi kebijakan terkait pencapaian TPB, BKSAP DPR RI juga berupaya untuk memetakan rancangan legislasi nasional yang dapat mendukung TPB secara substansial. Sebagai tambahan, BUSAP juga menguraikan praktik cerdas (*best practices*) yang diidentifikasi selama menjalankan fungsi dan tanggung jawab Panitia Kerja TPB di tahun 2018. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan BKSAP DPR RI, khususnya Panitia Kerja TPB dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat regional dan internasional. Kami juga berharap agar buku ini dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran menuju tercapainya agenda pembangunan global 2030.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.

Ketua Panja TPB

BKSAP DPR RI

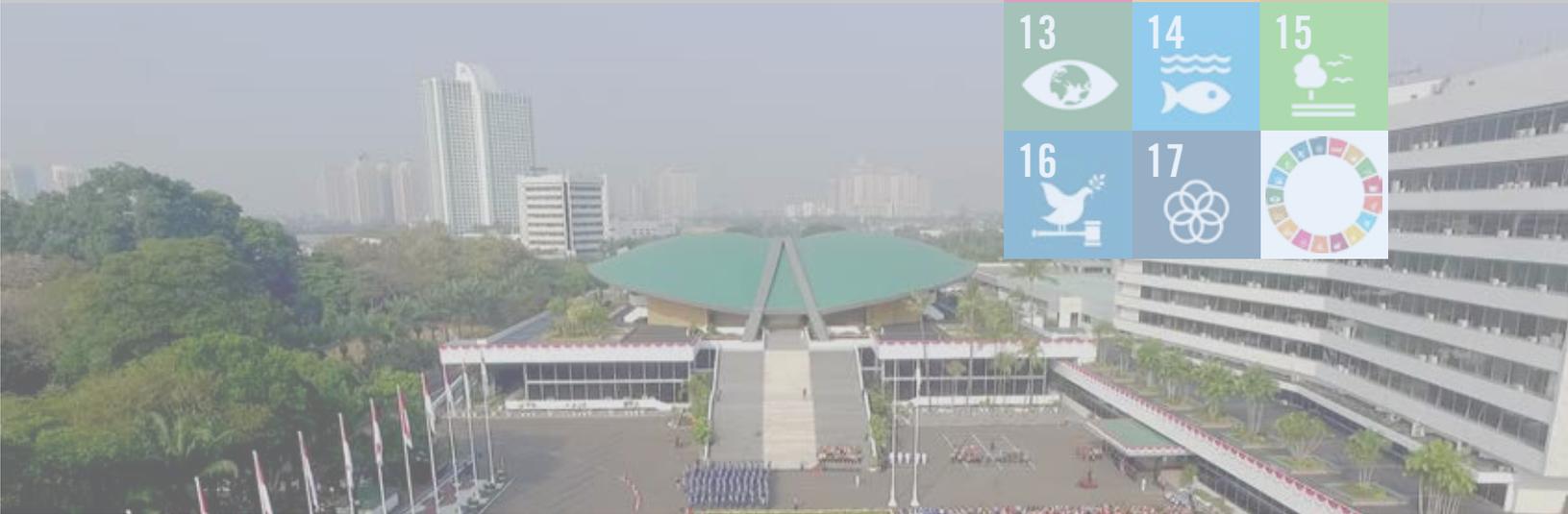


Ketua BKSAP memberikan sambutan di sidang The 2nd WPFSD Bali

BAGIAN SATU



ANGGOTA PANJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018





Ketua Delegasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf didampingi oleh Duta Besar RI melakukan pertemuan dengan Select Committee on Environment of the House of Representatives of New Zealand



ANGGOTA PANJA TPB 2018

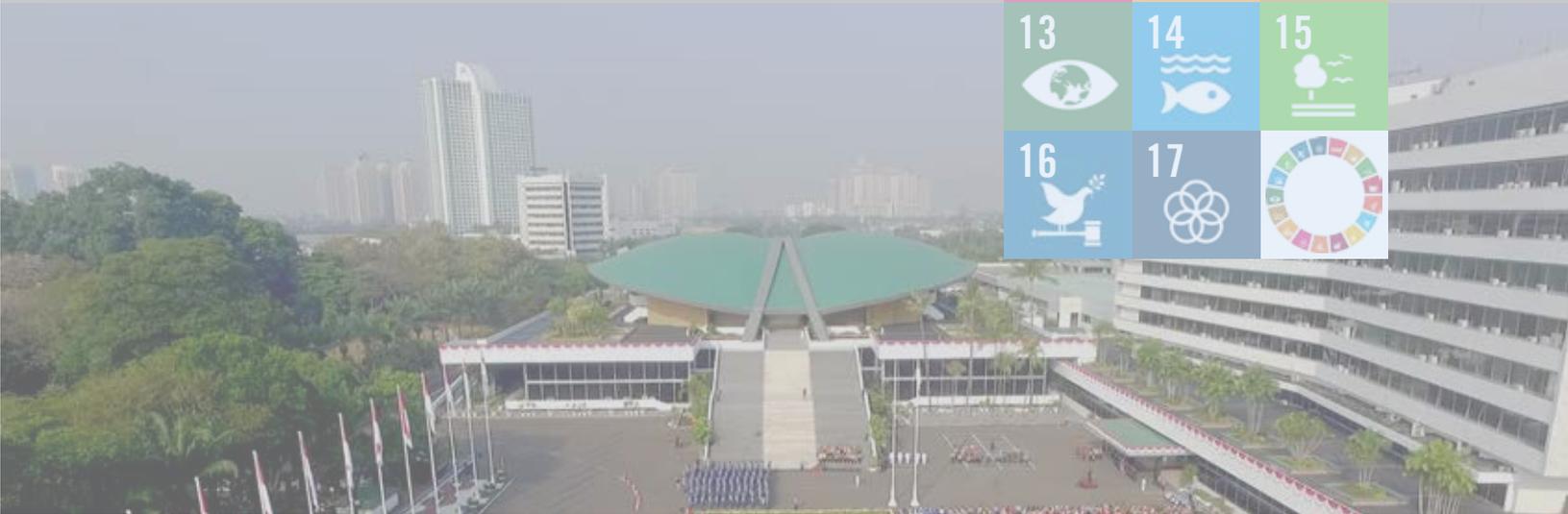
NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI	KOMISI	JABATAN
1.	Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	A-432	PD	XI	Ketua Panja
2.	Juliari P. Batubara	A-168	PDIP	VI	Wakil Ketua Panja
3.	H. Rofi Munawar, Lc	A-115	PKS	IV	Wakil Ketua Panja
4.	Dave Akbarshah Fikarno, ME	A-264	GOLKAR	I	Wakil Ketua Panja
5.	Drs. H. Hasrul Azwar, MM	A-507	PPP	III	Wakil Ketua Panja
6.	Dr. Evita Nursanty, M.Sc.	A-171	PDIP	I	Anggota Panja
7.	Ono Surono, ST	A-163	PDIP	IV	Anggota Panja
8.	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos	A-229	PDIP	I	Anggota Panja
9.	Dwi Ria Latifa	A-143	PDIP	III	Anggota Panja
10.	H. Muhidin Mohammad Said, SE., MBA	A-310	GOLKAR	V	Anggota Panja
11.	Bambang Atmanto Wiyogo, SE	A-250	GOLKAR	I	Anggota Panja
12.	Endang Srikarti Handayani, SH., M.Hum.	A-275	GOLKAR	VI	Anggota Panja
13.	Aryo P. S. Djojohadikusumo	A-342	GERINDRA	VII	Anggota Panja
14.	G. Budisatrio Djiwandono	A-386	GERINDRA	IV	Anggota Panja
15.	H. Nurzahedi, SE	A-333	GERINDRA	VI	Anggota Panja
16.	Mohamad Hekal, MBA	A-361	GERINDRA	VI	Anggota Panja
17.	Dr. H. Sjarifudin Hasan, SE., MM., MBA	A-416	DEMOKRAT	I	Anggota Panja
18.	Putu Supadma Rudana	A-442	DEMOKRAT	X	Anggota Panja
19.	Ahmad Yohan, M.Si.	A-497	PAN	IV	Anggota Panja
20.	Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi	A-472	PAN	VII	Anggota Panja
21.	Dra. Hj. Siti Masrifah, MA	A-77	PKB	IX	Anggota Panja
22.	H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag.	A-44	PKB	IV	Anggota Panja
23.	Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA	A-117	PKS	I	Anggota Panja
24.	H. Achmad Farial	A-517	PPP	VII	Anggota Panja
25.	Amelia Anggraini	A-17	NASDEM	IX	Anggota Panja
26.	Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE.	A-557	HANURA	V	Anggota Panja



Delegasi DPR-RI dengan Duta Besar RI berfoto bersama dengan Select Committee on Environment of the House of Representatives of New Zealand



**REKOMENDASI
TAHUN 2018
UNTUK PEMERINTAH
DAN UNTUK DPR RI**





Delegasi DPR-RI menghadiri sidang COP-24 di Krakow, Polandia



MENINGGAT bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan Indonesia untuk mencapai target TPB tahun 2030, maka Panja TPB memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah maupun anggota Dewan untuk dilaksanakan. Rekomendasi perlu diberikan karena hingga tahun 2018, Indonesia masih menduduki peringkat 99 dari 156 negara peserta TPB, artinya masih banyak ketertinggalan yang masih harus dibenahi oleh Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut:

UNTUK PEMERINTAH

1. AGAR DALAM PEMBAHASAN REVIEW NASIONAL (Voluntary National Review/ VNR) UNTUK PROSES REVIEW BERKALA DI UN ECOSOC HIGH LEVEL POLITICAL FORUM (HLPF) MELIBATKAN PANJA TPB DPR RI.

Review nasional yang menjadi proses review berkala di HLPF (National Voluntary Reviews/NVR) telah berlangsung. Pada tahun 2016, telah ada 22 negara yang mengajukan proses NVRs.¹ Indonesia telah mengajukan proses NVRs di HLPF pada 2017. Pada 2019, Indonesia sebagai salah satu negara dari 51 negara telah menyampaikan VNR di HLPF 2019. Berkaca dari VNR Indonesia pada 2017, maka mekanisme nasional dalam proses review 2019 seharusnya dilakukan secara inklusif termasuk dengan melibatkan DPR RI. Pemerintah perlu mempertegas institusi-institusi penanggung jawab pencapaian indikator-indikator yang ada dalam TPB;

2. PEMERINTAH HENDAKNYA MENGEMBANGKAN INOVASI PEMBIAYAAN YANG DAPAT Mendukung PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Upaya-upaya untuk melaksanakan TPB membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Pembiayaan dengan pendekatan konvensional tidak lagi relevan untuk memenuhi kebutuhan ini. Optimalisasi pendekatan baru pembiayaan—memadukan penerimaan negara, *blended finance*, CSR, dana sosial keagamaan, seperti zakat—menjadi sangat diperlukan sehingga secara efektif dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target-target pada tahun 2030.

3. PEMERINTAH INDONESIA HARUS DAPAT MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI YANG AKAN MENCAPAI PUNCAKNYA PADA 2020-2025.

Saat itu, mayoritas penduduk Indonesia berada di usia muda dan produktif. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, caranya dengan menyediakan lapangan kerja yang luas,

1 China, Colombia, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Madagascar, Mexico, Montenegro, Morocco, Norway, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sierra Leone, Switzerland, Togo, Turkey, Uganda, Venezuela. Lebih lanjut lihat <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs>



meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak.

4. PEMERINTAH PERLU MELUNCURKAN SERTIFIKASI TPB KEPADA SEKTOR SWASTA UNTUK MEMBERI PENGAKUAN DAN INSENTIF DALAM Mendukung PELAKSANAAN TPB DI INDONESIA.

Pengukuran kontribusi sektor swasta penting untuk melacak upaya nasional secara keseluruhan terhadap TPB. Di samping itu, upaya ini juga menerapkan prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan, yakni: inklusi dan partisipasi.

5. PEMERINTAH PERLU MELIBATKAN KAUM MUDA UNTUK SECARA AKTIF TERLIBAT DALAM TPB DI INDONESIA.

Perguruan Tinggi berperan penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk bertindak dalam pencapaian TPB, dan lebih banyak mahasiswa diperlukan untuk memobilisasi kaum muda di seluruh Indonesia.

6. SANGAT MENDESAK BAGI PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA DAN PEMBERLAKUAN DATA TUNGGAL UNTUK INDIKATOR TPB.

Hal ini diperlukan untuk menetapkan data acuan dasar yang kuat yang akan mengukur kemajuan pencapaian TPB secara kredibel. Data komprehensif harus menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Kontribusi aktor lain seringkali tidak ditangkap secara memadai oleh statistik pemerintah yang biasanya berfokus hanya pada program pemerintah.

7. UNTUK INTERNALISASI DI KALANGAN PESERTA DIDIK, PEMERINTAH PERLU DAN PENTING UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM AKSI DUNIA UNESCO TENTANG PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (GLOBAL ACTION PROGRAMME ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT).

Education for Sustainable Development (ESD) ini sangat bermanfaat untuk reorientasi pendidikan dan pembelajaran sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan. Selain itu, ESD bakal memperkuat pendidikan dan pembelajaran di semua agenda, program, dan kegiatan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

8. PEMERINTAH HARUS KONSISTEN DENGAN PRINSIP *NO ONE LEFT BEHIND*.

Dalam mengimplementasikan TPB, pemerintah hendaknya melibatkan semua



stakeholder terutama masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena TPB bukan hanya komitmen global Indonesia tetapi juga panduan Indonesia menuju negara yang lebih maju.

9. KERJASAMA INTERNASIONAL

Komitmen Indonesia menjalankan TPB sebaiknya dilakukan dengan menggalang kerjasama dengan negara maju terutama untuk memperoleh dukungan teknologi dan pendanaan. Kerjasama ini dapat menjadi ukuran bagi Indonesia untuk mengetahui seberapa besar komitmen negara lain dalam mencapai tujuannya pembangunan berkelanjutan

UNTUK DPR RI

1. PIMPINAN DPR RI PERLU SEGERA MENETAPKAN PANJA TPB BUSAP DPR RI SEBAGAI PENJURU (*FOCAL POINT*) DPR RI YANG MEMILIKI WEWENANG DALAM PENGARUSUTAMAAN DI LINGKUP PARLEMEN DAN PENGAWASAN TPB DI TINGKAT PEMERINTAH.

Panja TPB BUSAP DPR RI perlu segera memanggil Pemerintah untuk melaporkan VNR kepada Panja TPB DPR RI untuk supervisi. VNR yang nanti akan dilaporkan pemerintah di forum HLPF 2019 merupakan pembahasan komprehensif antara pemerintah dan DPR RI. Ke depan Panja TPB dapat menjalankan keterlibatan rutin (*regular engagement*) dengan pemerintah untuk tinjauan dan pengawasan implementasi yang konsisten.

2. DPR RI PERLU MEMPUNYAI DATA TANDINGAN IMPLEMENTASI TPB DI LAPANGAN.

Selama ini data hanya domain pemerintah semata, sehingga ukuran, konsep, dan definisi dari masing-masing tujuan, target, dan indikator hanya milik pemerintah. Ketersediaan data sangat penting untuk pengambilan keputusan kebijakan dan oleh karena itu kebutuhan untuk memastikan penguatan data, penelitian dan kapasitas dokumentasi parlemen. Sudah saatnya DPR RI mempunyai data primer seperti kesehatan, kemiskinan, pendidikan. Dengan data yang dimiliki tersebut, DPR RI dapat meninjau secara kritis dan akuntabel pencapaian TPB di lapangan.

3. DPR MELALUI BKSAP PERLU MENJADIKAN *WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WFSD)* SEBAGAI FORUM TAHUNAN INISIATIF DPR RI UNTUK TERUS BERKONTRIBUSI SECARA AKTIF DI KOMUNITAS GLOBAL DALAM MENYAMPAIKAN BERAGAM PERSPEKTIF PARLEMEN DALAM ISU-ISU TPB.



Forum yang diselenggarakan pada 2017 dan 2018 oleh BKSAP DPR RI ini strategis untuk membahas isu pembangunan berkelanjutan yang terkait jelas dengan TPB. Forum ini juga sebagai forum berbagi praktik cerdas dan lesson learned antarparlemen.

4. UNTUK MENGAMPANYEKAN TPB SECARA MASIF KEPADA KONSTITUEN, DPR RI PERLU MENYIARKAN KONTEN-KONTEN TERKAIT TPB VIA MEDIA SOSIAL ATAU KANAL BLOGSPOT.

Ini adalah bagian dari upaya DPR RI dalam menjaring kemitraan dengan masyarakat luas untuk menjamin bahwa program-program TPB dapat terserap di semua lapisan masyarakat. Selain itu, ini adalah mobilisasi semua sumber daya yang ada demi kesuksesan implementasi TPB.

5. UNTUK MEWUJUDKAN FUNGSI PENGANGGARAN DPR RI YANG INKLUSIF DAN PARTISIPATIF, KOMISI, BADAN, DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN TERKAIT HARUS MEMASTIKAN BAHWA ALOKASI ANGGARAN MENCERMINKAN PRIORITAS NASIONAL TPB.

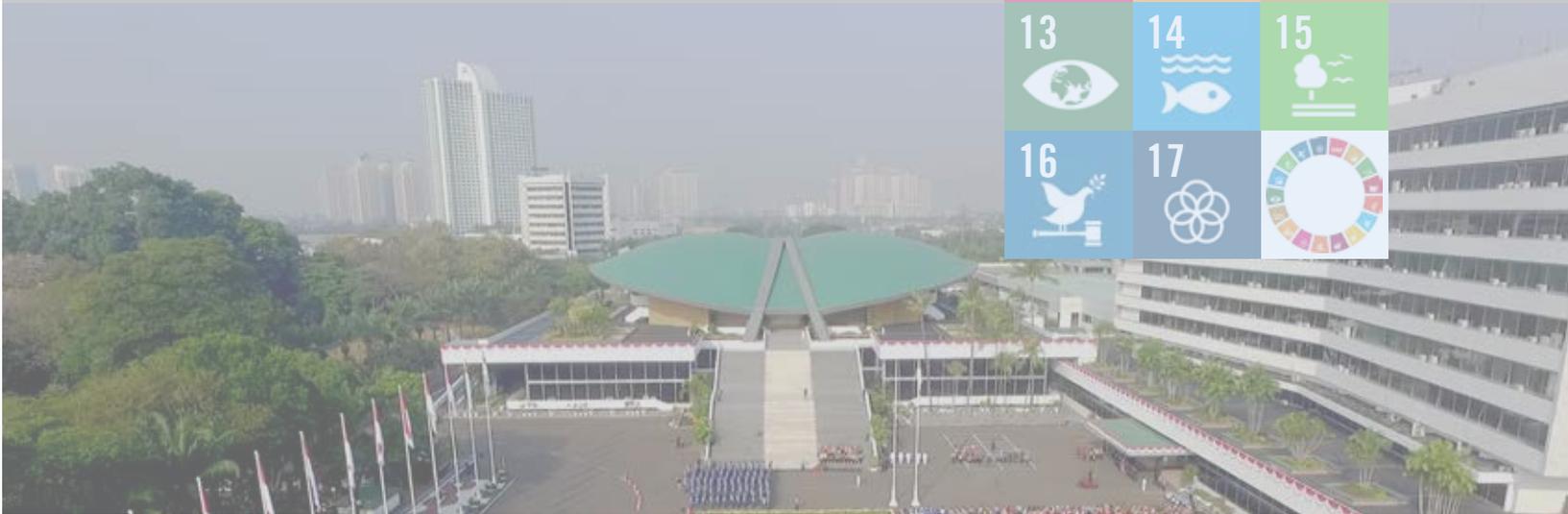
Untuk mewujudkan fungsi anggaran inklusif, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari tiap kementerian atau lembaga pemerintah perlu dikonsultasikan dengan panja TPB. Dalam forum konsultasi, Panja TPB dapat memberikan pertimbangan untuk persetujuan anggaran bagi kementerian dan lembaga terkait dengan prioritas program TPB.

6. UNTUK MENDUKUNG AKSI PARLEMEN UNTUK KETERLIBATAN DALAM TPB, PARA ANGGOTA PARLEMEN TERUS DIBERIKAN INFORMASI, KEAHLIAN, PENELITIAN DAN SARAN KEBIJAKAN YANG RELEVAN DENGAN TPB.

Dalam upaya ini, dibutuhkan keterlibatan aktif dan pengembangan kapasitas dari sekretariat, peneliti, dan tenaga ahli DPR RI dalam dokumentasi dan pemeliharaan catatan kegiatan yang tepat termasuk dukungan melakukan penelitian, penyediaan data, dan analisis kebijakan.

7. IMPLEMENTASI FUNGSI KEDEWANAN.

Upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan dalam kerangka menjalankan 3 fungsi yang dimiliki yaitu pengawasan, pembahasan UU serta dalam penganggaran, serta sebagai representasi rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Seluruh Komisi dan Badan bekerja untuk mendukung pencapaian TPB sejalan dengan perwujudan visi Nawa Cita. BKSAP menggalang kemitraan baik global dan nasional dalam rangka mencapai TPB, dan menjadi bagian dari diplomasi parlemen.



BAGIAN TIGA

KEGIATAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TAHUN 2018 UNTUK NASIONAL DAN INTERNASIONAL



*Opening Ceremony The 2nd World Parliamentary on Sustainable Development
di Bali tahun 2018*



NASIONAL

PADA TAHUN 2015, Indonesia menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pemerintah memandang perlu adanya penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Perpres tersebut dimaksudkan pula sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan Pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Perpres menetapkan 17 tujuan dan 169 sasaran yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan. Melalui Perpres ini pemerintah ingin memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah akan mengidentifikasi siapa dan di mana mereka yang tertinggal tersebut, untuk kemudian dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan.

Paradigma inklusivitas dalam partisipasi warga menjadi dasar partisipasi warga yang dimaksudkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan TPB. Prinsip TPB tentang *no one left behind* (tidak seorangpun tertinggal), membawa perspektif tentang hak asasi manusia, sehingga terbentuknya semangat partisipasi tidak hanya mengundang masyarakat tertinggal tetapi juga melibatkan mereka dalam dialog pembangunan. Semangat partisipasi pada akhirnya akan mampu mendorong akuntabilitas pembangunan serta membuka ruang bagi partisipasi warga dalam pembangunan.

Sebagai negara yang aktif menginisiasi dan memberikan komitmen besar untuk mewujudkan TPB, Indonesia berkomitmen untuk mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil, damai dan berkelanjutan. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dikeluarkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, rencana kerja pembangunan terpadu dan komprehensif, yang terwujud dari sinergi kerja antara pemerintah dan institusi nonpemerintah.

RAN TPB yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni tahun 2018 merupakan pedoman bersama yang disusun oleh pemerintah secara inklusif, rinci, transparan, terukur dan akuntabel, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, maupun akademisi, untuk mencapai 17 tujuan dan 169 sasaran TPB yang mencakup dimensi



sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola secara terintegrasi. Agar agenda pembangunan nasional dapat secara konkret berkontribusi signifikan dalam pencapaian agenda pembangunan global, Indonesia telah menyelaraskan RAN TPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

RAN TPB merupakan sebuah perencanaan yang dikerjakan sangat intensif untuk memenuhi capaian 319 indikator dengan ribuan kegiatan yang nyata. Lebih dari 200 institusi non-pemerintah yang berkontribusi dan terlibat secara intensif memperlihatkan bahwa prinsip inklusif TPB telah dijalankan secara konsisten. Sebagai salah satu *role model* dunia dalam proses pelaksanaan TPB, Indonesia membuka diri untuk bekerjasama dengan siapa pun yang berkeinginan besar untuk mendukung pencapaiannya baik di dalam maupun luar negeri.

Setelah RAN TPB diluncurkan, fokus pemerintah beralih pada implementasi kegiatan atau program yang mendukung pencapaian tujuan TPB dengan monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Pemerintah telah memastikan bahwa RAN TPB akan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun institusi non-pemerintah. Selanjutnya, setelah RAN terbentuk, maka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB harus terbentuk di 34 provinsi. Dan secara inklusif pula RAD TPB akan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk institusi nonpemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Saat ini, Indonesia juga tengah menyusun Peta Jalan TPB 2030 yang merangkum capaian, peluang dan tantangan pelaksanaan TPB, serta proyeksi indikator penting TPB yang dilengkapi berbagai opsi kebijakan untuk mencapai sasaran TPB pada 2030. Secara keseluruhan terdapat beberapa fokus TPB yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas pemerintah seperti:

1. Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
2. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan



biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.

5. Perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61 tahun 2011 dan Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Keselarsan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan dalam Nawacita diharapkan dapat mempercepat pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim.

Kendati demikian, masih ada beberapa tujuan yang perlu dikelola untuk mencapai target 2030 seperti pendidikan berkualitas (tujuan ke-4), kesejahteraan jender (tujuan ke-5), serta kota dan permukiman yang berkelanjutan (tujuan ke-11). Diantara 17 tujuan yang harus dicapai, pendidikan berkualitas menjadi tujuan dengan capaian target terbaik. Sebagian tujuan TPB di Indonesia sudah tercapai dengan baik. Namun, sebagian tujuan belum bisa diwujudkan oleh Indonesia adalah *equality* (kesetaraan) dan keadilan. Salah satu parameter pengukur kesenjangan adalah rasio gini. Semakin tinggi nilainya maka semakin timpang pengeluaran dan kekayaan penduduk. Adapun rasio gini yang dimiliki Indonesia pada tahun 2014 mencapai 0,414 dan turun menjadi 0,389 pada 2018. Namun, nilai itu dipandang masih tinggi.

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan sangat bergantung pada tiga faktor, yaitu Percepatan, Pembiayaan dan Inklusi. Percepatan ini diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten agar dapat mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada bulan Juli 2018, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimandatkan oleh Perpres. Mereka juga harus siap untuk mengintegrasikan sasaran, target dan indikator TPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Pengalaman provinsi yang telah melaksanakan TPB seperti Riau, telah melibatkan pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kerjasama dalam memprioritaskan dan merencanakan tindakan dengan bantuan perangkat analisa data akan sangat mendukung percepatan di seluruh Indonesia. Terdapat pula kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas pemerintah daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang dapat dicapai melalui pembentukan Akademi Pembangunan Berkelanjutan untuk pejabat daerah.

Percepatan juga diperlukan untuk pengumpulan data. BPS telah mengumpulkan data untuk indikator Pembangunan Berkelanjutan, yang sekarang perlu dilengkapi dengan data dari kementerian dan lembaga sesegera mungkin. Hal ini diperlukan untuk menetapkan data acuan dasar yang kuat yang akan mengukur kemajuan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan secara kredibel. Pergeseran fundamental diperlukan untuk melihat Pembangunan Berkelanjutan sebagai peluang satu triliun dolar, dan bukan kesenjangan pendanaan untuk dijumpai. Di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, bantuan asing menurun dan anggaran nasional tidak cukup untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan.

Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan tidak terlepas dari keberhasilan diversifikasi arus keuangan dan investasi secara terbuka. Inisiatif ke arah itu telah dilakukan Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah diantaranya adalah dengan menerbitkan Sukuk Hijau oleh Kementerian Keuangan. Penerbitan Sukuk Hijau yang sedang berjalan saat ini dimaksudkan untuk membentuk Dana Sumber Daya Alam pertama di Indonesia di tingkat kabupaten.

Prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan adalah inklusi dan partisipasi. Selain konsultasi, berbagai platform dibutuhkan di tingkat nasional dan daerah yang akan mempertemukan pemerintah, penanam modal, perusahaan, filantropi, masyarakat madani dan akademisi dan mendorong kemitraan nyata. Kemitraan tersebut harus diperbaiki untuk memberi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor yang berbeda terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Pengukuran kontribusi sektor swasta penting untuk melacak upaya nasional secara keseluruhan terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Sertifikasi Pembangunan Berkelanjutan yang diberikan kepada perusahaan swasta akan memberi pengakuan dan insentif untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Inovasi daerah penting demi tercapainya target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena inovasi tersebut penting dalam meningkatkan layanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan bukan hal baru bagi Pemerintah Daerah. Pembangunan Berkelanjutan membantu Pemerintah Daerah untuk fokus pada seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Selain itu, Indonesia juga masih perlu lebih banyak berinvestasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Indonesia masih menghadapi salah satu tantangan besar yakni keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah. Agar terbebas dari “*middle income trap*”, Indonesia harus mengembangkan basis data yang berasal dari riset dan pengembangan teknologi untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Sementara Indonesia hanya memiliki 89 periset setiap satu juta penduduk, dengan 0,1 persen PDB atau senilai 2 miliar dolar AS digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga dapat dicapai dengan adanya sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan di setiap negara. Masyarakat Sipil, termasuk perempuan dan swasta (pelaku usaha) berperan sangat penting dalam mendukung berbagai aksi nyata di berbagai bidang agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dicapai dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan (*no one left behind*). Membangun kesadaran semua pihak untuk bermitra menjadi kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Indonesia, jaringan (perusahaan) lokal sangat dekat dengan pemerintah

Penyelesaian Pembahasan RUU Berkaitan dengan TPB

Untuk percepatan pencapaian TPB, pemerintah bersama-sama DPRRI hendak mempercepat proses pembahasan beberapa RUU. Beberapa RUU yang perlu segera diselesaikan antara lain:

1. RUU tentang Pertanahan;
2. Revisi UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
3. Revisi UU No 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman hayati;
4. RUU Masyarakat Adat
5. RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
7. RUU tentang Sumber Daya Air.
8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
9. RUU tentang Perkelapasawitan.
10. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
11. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
13. RUU tentang Ekonomi Kreatif
14. RUU Hubungan Luar Negeri



INTERNASIONAL

High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development

HLPF 2018 diselenggarakan pada 9-18 Juli dan dihadiri oleh lebih dari 125 Kepala dan Wakil Kepala Negara, Menteri, Wakil Menteri dan pejabat setingkat menteri, serta lebih dari dua ribu perwakilan pemerintah, organ PBB dan organisasi internasional lainnya, masyarakat sipil, LSM dan sektor swasta. Pertemuan ini mengangkat tema "*Transformation towards sustainable and resilient societies*".

Pertemuan HLPF 2018 mengulas secara mendalam enam dari 17 TPB, yaitu: air dan sanitasi (SDG 6); energi berkelanjutan dan modern (SDG 7); perkotaan dan permukiman (SDG 11); pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDG 12); pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan, pencegahan desertifikasi, revitalisasi lahan, dan pelestarian keanekaragaman hayati (SDG 15); serta kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (SDG 17).

Sebagai bagian dari mekanisme pengimplementasian TPB, negara-negara anggota didorong untuk melakukan *Voluntary National Review (VNR)* secara inklusif di tingkat nasional dan sub-nasional. VNR diharapkan dapat membantu tinjauan rutin yang dilakukan oleh HLPF. Sebagaimana diatur dalam *2030 Agenda for Sustainable Development* paragraf 84, tinjauan berkala oleh HLPF dilakukan secara sukarela oleh negara maju dan berkembang dengan menyediakan *platform* kemitraan bagi seluruh pemangku kepentingan. VNR juga berfungsi sebagai sarana *sharing* pengalaman dan praktik cerdas, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam mengimplementasikan TPB. VNR juga diharapkan dapat memperkuat institusi pemerintah serta memobilisasi dukungan dan kemitraan antar pemangku kepentingan.

Pada 2018, sebanyak 48 negara menyerahkan VNR pada pertemuan HLPF, yaitu Albania, Andorra, Armenia, Australia, Kepulauan Bahamas, Bahrain, Benin, Bhutan, Cabo Verde, Kanada, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Yunani, Guinea, Hungaria, Irlandia, Jamaika, Kiribati, Laos, Latvia, Libanon, Lituania, Mali, Malta, Meksiko, Namibia, Niger, Paraguay, Polandia, Qatar, Rumania, Saudi Arabia, Senegal, Singapura, Slovakia, Spanyol, Sri Lanka, Palestina, Sudan, Swiss, Togo, Uni Emirat Arab (UEA), Uruguay, dan Vietnam.

Pada tahun ketiga diimplementasikannya TPB, komitmen untuk menyukseskan agenda pembangunan global semakin meningkat. HLPF mengakui adanya kemajuan di berbagai bidang. TPB juga telah diadopsi secara luas ke dalam rencana pembangunan nasional. Negara-negara anggota juga terus memastikan kesinambungan antara TPB dan *Paris Agreement*, *Sendai Framework*, dan *Addis Ababa Action Agenda*, serta instrumen-instrumen lainnya yang telah disepakati secara internasional.



HLPF 2018 mengadopsi *Ministerial Declaration* (dokumen E/HLPF/2018/L.2) melalui voting dengan 164 suara yang mendukung dan 2 suara menentang (Israel dan Amerika Serikat). Melalui Deklarasi ini, para menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk memberantas kemiskinan dan mengambil langkah bersama untuk membuat perubahan. Mereka juga berkomitmen untuk mengapresiasi keberagaman di kota-kota dan permukiman lainnya, serta untuk memperkuat kohesi sosial, toleransi dan dialog antarbudaya. Mereka juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadopsi pendekatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi limbah makanan. Deklarasi ini menggarisbawahi berbagai tantangan terkait limbah plastik, terutama di lautan, serta menekankan peran penting ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam mencapai TPB.

Dalam HLPF, negara-negara anggota mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat diwujudkan tanpa perdamaian dan keamanan. Deklarasi ini menyerukan agar negara-negara anggota mengambil langkah-langkah efektif sesuai dengan hukum internasional demi menjamin hak orang-orang yang hidup dalam pendudukan kolonial/asing untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Deklarasi ini juga menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Dokumen ini juga mendorong terbukanya akses yang setara bagi perempuan dalam memiliki atau menguasai lahan dan sumber daya alam.

Paragraf 83 dari *2030 Agenda for Sustainable Development* menekankan bahwa Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global (*Global Sustainable Development Report*) adalah salah satu elemen penting dari proses tindak lanjut dan peninjauan pencapaian TPB. Laporan ini akan menyediakan informasi berbasis bukti (*evidence-based information*) untuk mendukung para penyusun kebijakan dalam mempromosikan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mencakup ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan secara universal.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan mengenai situasi pembangunan berkelanjutan secara global dari perspektif ilmiah, serta memberikan praktik cerdas untuk menjawab berbagai tantangan dalam mencapai TPB. Laporan yang komprehensif akan dipublikasikan setiap empat tahun untuk kemudian diserahkan kepada HLPF. Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global berikutnya akan diterbitkan pada 2019.

HLPF 2019 akan diselenggarakan di bawah naungan *Economic and Social Council* (ECOSOC) pada 9-18 Juli 2019 dengan mengangkat tema "*Empowering people and*



ensuring inclusiveness and equality". Sebanyak 51 negara telah mengajukan diri untuk menyampaikan VNR pada pertemuan mendatang. HLPF 2019 akan meninjau sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan secara mendalam, yang meliputi:

- Goal 4.* Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
- Goal 8.* Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, ketersediaan lapangan kerja yang produktif dan layak untuk semua.
- Goal 10.* Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara anggota.
- Goal 13.* Mengambil tindakan nyata untuk memerangi dampak perubahan iklim.
- Goal 16.* Mempromosikan terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses peradilan bagi semua, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Goal 17.* Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

UN World Data Forum

Pada November 2014, *the United Nations Secretary-General's Independent Expert and Advisory Group on Data Revolution for Sustainable Development* merekomendasikan pembentukan *UN World Data Forum* untuk mengintensifkan kerja sama antara organ-organ PBB dengan berbagai kelompok profesional. Pertemuan pertama *UN World Data Forum* diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 15-18 Januari 2017. Pertemuan ini menghasilkan *Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data*.

Pada tahun 2018, pertemuan kedua *UN World Data Forum* diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 22-24 Oktober. Sebanyak lebih dari 1.500 ahli data dari lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam forum tersebut, termasuk ahli statistik nasional, ahli data dari sektor swasta dan akademisi, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil. Di bawah naungan PBB, forum ini bertujuan untuk mempertemukan para produsen dan pengguna data, serta meluncurkan inovasi yang akan menghasilkan data yang lebih baik mengenai kesehatan, migrasi, pengungsi, pendidikan, pendapatan, lingkungan, hak asasi manusia, dan aspek-aspek lainnya yang tercakup dalam pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan tahun ini membahas enam tema utama yang mencakup: Pengembangan kapasitas nasional; pengumpulan sumber data dan mengintegrasikan sumber data non-tradisional; penggunaan data dan statistik secara inklusif untuk mendukung pencapaian TPB; peningkatan komunikasi dan literasi data dan statistik; membangun kepercayaan terhadap data dan statistik; dan peninjauan terhadap proses implementasi *Cape Town Global Action Plan* yang diadopsi pada pertemuan *UN World Data Forum* tahun 2017 lalu.



Pertemuan *UN World Data Forum* kedua mengadopsi *The Dubai Declaration* yang menegaskan komitmen negara-negara anggota untuk melanjutkan cita-cita dan perjalanan yang dimulai dari pertemuan *UN World Data Forum* di Cape Town. Deklarasi ini juga mendorong negara-negara untuk fokus pada implementasi dan solusi praktis serta membahas permasalahan *data financing*.

Pertemuan *UN World Data Forum* ketiga akan diselenggarakan di Bern, Swiss pada 18-21 October 2020. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah hal, antara lain: Situasi terkini dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik; tinjauan pencapaian negara-negara anggota dalam mengimplementasikan *Cape Town Global Action Plan*; serta mengukur potensi investasi dari pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data statistik yang lebih baik.

The SDG's Report

Pada tahun 2018, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan laporan PBB terkait pencapaian TPB. Tinjauan umum ini menyoroti kemajuan dan kesenjangan global untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara ringkas, laporan ini menyebutkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita *no one is left behind* (tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan berkelanjutan), pencapaian TPB harus diakselerasi. Untuk setiap tujuan, laporan TPB 2018 menyebutkan:

- 1) Kemiskinan ekstrem telah berkurang sejak 1990, namun kantong-kantong kemiskinan dengan kondisi yang terburuk masih tetap ada.
- 2) Tingkat kelaparan dunia diperparah dengan konflik, kekeringan dan bencana yang terkait dengan perubahan iklim.
- 3) Masih banyak orang yang menderita karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah (*preventable disease*).
- 4) Lebih dari setengah anak-anak dan remaja di seluruh dunia tidak memenuhi standar kecakapan minimum dalam membaca dan matematika.
- 5) Beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan mulai berkurang. Namun, ketidaksetaraan gender masih terus terjadi.
- 6) Masih banyak orang yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang aman.
- 7) Ketersediaan akses terhadap energi yang terjangkau, handal dan modern mulai berkembang, terutama terkait dengan efisiensi energi di bidang industri.
- 8) Secara global, produktivitas tenaga kerja meningkat dan tingkat pengangguran menurun.
- 9) Untuk mencapai sektor industri yang inklusif dan berkelanjutan, aspek ekonomi yang kompetitif perlu dikembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja. Selain itu, perdagangan internasional harus terus difasilitasi. Penggunaan sumber daya yang efisien juga perlu diupayakan.



- 10) Kesenjangan di dalam dan antara negara-negara anggota masih terus terjadi.
- 11) Banyak kota di dunia yang menghadapi tantangan dalam mengelola arus urbanisasi.
- 12) Pada 2018, Sebanyak 108 negara telah memiliki kebijakan dan inisiatif nasional yang relevan dengan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- 13) Dunia masih terus mengalami kenaikan permukaan laut, kondisi cuaca ekstrem dan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca.
- 14) Stok ikan laut terus menurun secara signifikan.
- 15) Ada upaya yang lebih giat dalam perlindungan ekosistem hutan dan darat. Laju deforestasi dapat ditekan.
- 16) Banyak wilayah di dunia yang masih mengalami konflik bersenjata atau bentuk kekerasan lainnya.
- 17) Mengenai kemitraan global, seluruh pemangku kepentingan harus lebih fokus dan mengintensifkan upaya mereka di bidang-bidang tertentu di mana pencapaian tujuan berjalan dengan lambat.

Perkembangan lebih lanjut dan data statistik terkait laporan TPB 2018 dapat dilihat di <https://unstats.un.org/TPB/report/2018>.

Global Compact for Migration (GCM)

The Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration diselenggarakan di Marakesh, Maroko pada 10-11 Desember 2018, di bawah naungan Majelis Umum PBB sesuai mandat resolusi 71/1 tanggal 19 September 2016, berjudul "*New York Declaration for Refugees and Migrants*". Konferensi tersebut mengadopsi *Global Compact for Migration (GCM)*.

GCM adalah instrumen internasional pertama yang membahas isu migrasi internasional dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya. GCM tidak mengikat secara hukum dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan negara, tanggung jawab bersama, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui GCM, negara-negara menyadari pentingnya pendekatan kooperatif untuk mengoptimalkan manfaat migrasi secara keseluruhan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan upaya untuk mengatasi berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi, baik oleh individu maupun masyarakat di negara asal, transit dan tujuan migrasi.

GCM terdiri dari 23 tujuan² yang disusun sebagai upaya untuk mengelola migrasi secara komprehensif. Secara umum, penyusunan GCM dimaksudkan untuk:

- Mengurangi faktor-faktor negatif yang mencegah masyarakat untuk membangun dan mempertahankan mata pencaharian yang berkelanjutan di negara asal mereka.

2 Daftar 23 tujuan GCM dapat ditemukan dalam paragraf 16 *Global Compact for Migration*.



- Mengurangi risiko, tantangan, dan kerentanan yang dihadapi migran dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi mereka.
- Mengurangi kekhawatiran negara dan masyarakat terhadap perubahan demografis yang diakibatkan oleh migrasi.
- Menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan para migran untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui kapasitas yang mereka miliki dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Open Government Partnership (OGP) Global Summit

Georgia menjadi tuan rumah OGP *Global Summit* ke-5 di Tbilisi, Georgia, pada 17-19 Juli 2018. Sekitar 2.000 peserta dari 96 negara turut berpartisipasi dalam pertemuan ini, termasuk pejabat pemerintah, masyarakat sipil, dan perwakilan dari lembaga multilateral, sektor swasta, akademisi, lembaga *think tank*, dan pemangku kepentingan lainnya.

Topik diskusi OGP *Global Summit* 2018 difokuskan pada partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi, dan layanan publik yang memadai. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mempromosikan praktik cerdas dan mendorong sistem pemerintahan yang terbuka untuk mengatasi berbagai tantangan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Kanada akan menjadi tuan rumah OGP *Global Summit* di Ottawa pada 29-31 Mei 2019. Ada tiga topik utama yang akan menjadi prioritas dalam pertemuan OGP mendatang, yaitu: *Participation, inclusion, dan impact*.

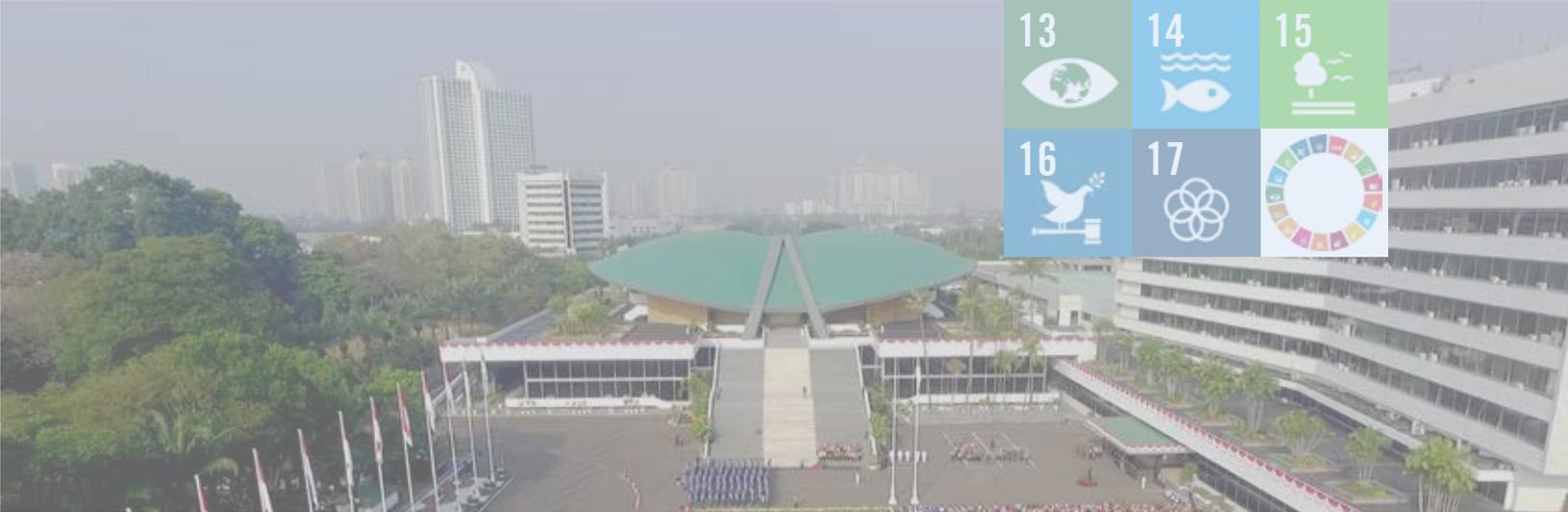


Chair of WPFSD pada sidang The 2nd World Parliamentary on Sustainable Development di Bali tahun 2018

BAGIAN EMPAT



KEGIATAN PANJA TPB DI TAHUN 2018





Delegasi Panja SDGs BKSAP melakukan kunjungan ke UKM di Aceh



SEBAGAI ALAT kelengkapan yang dibentuk oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Panja TPB melakukan beragam kegiatan untuk memantau, mengukur dan mengkaji kesiapan pelaksanaan TPB di Indonesia dan di berbagai daerah. Selain itu, anggota Panja TPB dalam kapasitasnya sebagai anggota BKSAP berkiprah dalam beragam diskusi global terkait TPB. Diskusi dan dialektika global tersebut sangat penting untuk pengayaan wacana DPR RI maupun dalam upaya membangun kemitraan global sejalan dengan kepentingan Indonesia.

DALAM NEGERI

Kunjungan Panitia Kerja TPB BKSAP DPR RI ke Provinsi Aceh

Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BKSAP DPR RI pada bulan Maret 2019 telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Ketua Panja TPB yang juga Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf. Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Drs. Dermawan. Pertemuan membahas kesiapan Aceh dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun 2018 adalah pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara anggota PBB. Menurut Dr. Nurhayati Ali Assegaf, Indonesia—di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono—adalah negara strategis yang ikut memimpin proses perumusan TPB di High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) sebuah lembaga bentukan Sekjen PBB. Indonesia berperan penting dalam agenda global yang bersifat *bottom-up* tersebut. Dalam masa sekarang, Indonesia harus menunjukkan komitmen dalam kesuksesan TPB di tingkat nasional dan daerah.

Untuk menerjemahkan TPB dalam konteks lokal Aceh, pembangunan Aceh diarahkan menuju keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan yang arahnya tidak merusak lingkungan. Fokus pembangunan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Parameter ukuran masyarakat miskin diukur dengan tiga hal: air bersih, hidup layak, dan infrastruktur. Program PKK juga digagas sebagai cara untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Kader PKK diarahkan untuk penghijauan mewujudkan Aceh Green. Program lainnya adalah penanaman pohon. Untuk pemberdayaan ekonomi, kader-kader PKK Aceh mengadakan penyuluhan kerajinan tangan dan penggunaan sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Panja TPB, Dr. Nurhayati Ali Assegaf juga menekankan pentingnya Aceh untuk memerangi *illegal fishing*, narkoba, dan maraknya tenaga kerja asing yang membanjiri beberapa wilayah Indonesia. Ia mengingatkan bahwa narkoba dapat masuk melalui *illegal fishing*. Ia menekankan pentingnya Aceh untuk mempertahankan



perdamaian berkelanjutan (*sustainable peace*). Mempertahankan perdamaian harus pula dengan menghadirkan keadilan, karena menurutnya tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan.

Kunjungan Panitia Kerja TPB BKSAP DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara

Pada tanggal 4 – 6 April 2018, Panitia Kerja TPB BKSAP DPR-RI telah melakukan kunjungan ke Manado dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada pertemuan tersebut, Ketua Panja TPB, Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal keterwakilan perempuan diberbagai bidang seperti unsur Pimpinan Akademisi/Rektor dan Bupati serta unsur Kepala SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong perkembangan penerapan TPB di Provinsi Sulawesi Utara.



Pertemuan Delegasi Panja SDGs BKSAP dengan Pemda Sulawesi Utara

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan beberapa program prioritas daerah yang sinergis dengan *Sustainable Development Goals*, antara lain: Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan), Peningkatan Daya Saing Investasi, dan Pembangunan Pariwisata dan Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim. Delegasi Panja TPB juga mengunjungi Sekolah SMK Negeri I Manado yang juga salah satu sekolah yang menerapkan sistem pengawasan untuk memonitor setiap kegiatan belajar mengajar.



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini juga terus mematangkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara yang diharapkan dapat mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan di Bumi Nyiur Melambai. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan sebesar 33,48% dibanding November 2017 yang berjumlah 6.433 orang. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berpengaruh kepada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Sulawesi Utara pada Desember 2017 mencapai 76,26% meningkat 13,74% dibandingkan dengan TPK November 2017.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara juga terus mengembangkan sektor kesehatan. Beberapa program-program yang diprioritaskan yakni peningkatan kesehatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan menular, promosi kesehatan serta kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Sulut juga mengalokasikan anggaran sebesar 40 miliar untuk pembangunan rumah sakit yang ada di berbagai daerah di Sulut.

World Parliamentary Forum on Sustainable Development

Pada tahun 2017, BKSAP DPR-RI telah sukses mengadakan konferensi yang memfokuskan kepada peran Parlemen di TPB dalam rangka mendukung pemerintah mencapai Agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang pertama mengambil tema “*Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development*”, dan menghasilkan Bali Declaration yang dibuat untuk mengarahkan peserta dalam upaya mereka untuk mencapai TPB.

Pada tahun 2018, BKSAP DPR-RI kembali mengadakan Konferensi *The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development* mengambil tema “*Partnership Towards Sustainable Energies for All*” Tema ini diangkat dengan 4 sesi utama, yaitu 1) *Responsible Energy Consumption and Production for Sustainable Cities and Communities*; 2) *Quality Education & Technology towards Green Industry*; 3) *Women Participation and Sustainable Energy*; and 4) *The Way Forward: Parliamentary Action for Universal Access to Affordable, Reliable and Sustainable Energy (Call for Action)*. Selain keempat tema utama tersebut, konferensi ini juga memiliki 1 (satu) *Special Session* yang berisi penyampaian *National Statement* dari masing-masing negara peserta konferensi.

2nd WPFSD ini menghasilkan Komitmen Bali yang telah diadopsi oleh seluruh peserta. Komitmen Bali adalah dokumen hasil dari apa yang telah didiskusikan dalam dua hari. Komitmen Bali terdiri dari komitmen semua peserta untuk mencapai TPB dalam kaitannya dengan masing-masing negara peserta. pertemuan ke-2 WPFSD menghasilkan lebih banyak ide dan mendorong mereka untuk memulai mengambil tindakan tindak lanjut yang perlu dilakukan, dan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk



Seluruh delegasi sidang 2nd WPFSD berfoto bersama

memastikan pengembangan energi berkelanjutan dan terbarukan di negara masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam dokumen hasil yang telah disetujui, yaitu Komitmen Bali.

LUAR NEGERI

Kunjungan Panitia Kerja TPB BKSAP DPR RI ke New Zealand

Pada bulan Mei 2018, panitia kerja TPB BKSAP telah melakukan kunjungan kerja ke New Zealand dengan membawa misi diplomasi parlemen bertemu dengan para pemangku kepentingan di New Zealand guna saling bertukar pikiran, pandangan, pengalaman dan praktik cerdas terkait implementasi TPB baik di Indonesia maupun New Zealand. Kunjungan BKSAP DPR RI mengeksplorasi upaya Parlemen New Zealand dalam memantau implementasi nasional TPB dan dalam menyediakan kebijakan yang tepat dan relevan untuk mendukung TPB.

Pada pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa New Zealand memanfaatkan energinya dari energi angin, bioenergi, matahari dan laut. Sejak tahun 2016, 40% pasokan energi New Zealand bersumber dari energi terbarukan. New Zealand juga mempunyai program bantuan internasional (*official development assistance*) yang menasar negara-negara pasifik.



Delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan Parliamentary Friendship Group of the House of Representatives of New Zealand

Selain itu, Indonesia dan New Zealand merupakan aktor internasional dalam penyusunan TPB. Indonesia diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono duduk sebagai High Level Panel on Eminent Person (HLPEP) bentuk Sekjen PBB. Sementara New Zealand adalah negara yang menjadi perunding TPB yang mewakili kepentingan negara-negara pasifik. TPB secara peristilahan tidak begitu populer di kalangan masyarakat New Zealand. Akan tetapi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan telah lama hidup menjadi prioritas pembangunan nasional New Zealand. Parlemen New Zealand tidak secara spesifik mempunyai organ khusus di Parlemen yang menjadi penjurur TPB. Fungsi-fungsi di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran tentang tujuan, target, dan indikator TPB diletakkan pada masing-masing *select committee* yang membawahi kementerian dengan portofolio masing-masing. Pembahasan legislasi terkait dengan TPB di tingkat *select committee* dirumuskan secara bersama-sama oleh partai pemerintah dan partai oposisi sebelum diambil keputusan final. Perdebatan antarpantai dipenuhi dengan pandangan filosofis masing-masing partai tersebut.

Kunjungan Panitia Kerja TPB BKSAP DPR RI ke Kazakhstan

Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kazakhstan bertujuan untuk membangun kemitraan global serta bekerja lebih kolaboratif dengan Kazakhstan dengan membandingkan pengetahuan dan praktik-praktik terbaik pemerintah, parlemen, dan pemangku kepentingan Kazakhstan lainnya dalam mendukung penerapan SDG. Delegasi



mendapatkan beberapa informasi dan praktik cerdas implementasi TPB di Kazakhstan. Salah satunya adalah saat ini, Kazakhstan melokalisasi TPB dengan memasukkan dalam program pembangunan nasional Kazakhstan yang tertuang dalam Strategi Kazakhstan 2050 dan 100 Aksi Nyata. Pemerintah Kazakhstana juga sedang melakukan Proyek Pembangunan Nasional Kazakhstan yang bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan terhadap lingkungan dan ekonomi Kazakhstan melalui transisi ke model Ekonomi Hijau.

Pendapatan negara di Kazakhstan bergantung pada pasokan minyak dengan kalkulasi 50 persen dari PDB negara itu pada tahun 2017. Beberapa proyek energi baru dan terbarukan yang tengah dikembangkan adalah: tenaga hidro, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga biomassa. Kazakhstan juga mengadopsi *Green Bridge Initiative* yang menargetkan konservasi di lima sektor: (1) Ekosistem pegunungan dan lahan basah, (2) Energi bersih dan berkelanjutan (ketersediaan dan efisiensi), (3) Ketahanan pangan, (4) Infrastruktur dan transportasi perkotaan, (5) Adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Dalam hal peningkatan TPB, Kazakhstan saat ini sedang menyusun indikator yang selaras dengan prioritas nasional untuk mengembangkan sector-sector yang diutamakan pemerintah.

High Level Panel Forum di New York

Sebagai bentuk komitmen seluruh masyarakat dunia, TPB membuat *High Level Political Forum* (selanjutnya disingkat HLPF) *on Sustainable Development* yang digunakan sebagai mekanisme *follow-up* dan *review* negara-negara anggota PBB demi tercapainya program-program pembangunan berkelanjutan bersama. Terkait tema tahun 2018, yaitu *Transformation towards Sustainable and Resilient Societies*, TPB juga memiliki perhatian terhadap produksi dan konsumsi yang selama ini dinilai tidak berkelanjutan atau pemborosan terkait sumber daya alam. Selanjutnya, TPB menciptakan *Sustainable Consumption and Production* (SCP) sebagai salah satu sub-tema aksi perwujudan pembangunan berkelanjutan di Deklarasi Rio pada tahun 1992 lalu.

Penerapannya dilanjutkan serta dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation*. Dalam proses selanjutnya, hasil pertemuan *High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on the post-2015 Development Agenda* yang diadakan di Bali pada tahun 2013 telah menjadikan SCP sebagai salah satu pilar utama bagi *post-2015 Development Agenda*, kemudian menjadi goal ke 12 di TPB. Perkembangan SCP di Indonesia dapat dilihat di KLH (Kantor Lingkungan Hidup RI) sebagai *focal point* dalam penerapan SCP. Pada tahun 2012, KLH mengkoordinasikan Forum SCP Indonesia. Sasaran kerjanya adalah *National Action Plan*, termasuk pengembangan infrastruktur informasi terpadu antar pihak tentang pengumpulan sumber daya untuk penerapan SCP (*Indonesian SCP Resource Pool*).



Indonesia melakukan penerapan SCP melalui beberapa perangkat yang telah dikembangkan oleh KLH RI, seperti Produksi Bersih (Eko-efisiensi), verifikasi Kinerja Teknologi Ramah Lingkungan, dan Sistem Manajemen Lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan serta kriteria Eko Label untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan.

Dalam *statement*-nya di sesi *Parliamentary Side Event*, Ketua Delegasi DPR-RI, Dr. Nurhayati Ali Assegaf menghimbau masyarakat dunia untuk melakukan upaya bersama serta memperkuat kerja sama internasional yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan serta trend konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya proses perumusan kebijakan nasional secara rinci dan efektif. Indonesia telah menyusun dokumen untuk mendukung pencapaian TPB, yaitu: Road Map of SDGs; Rencana Aksi Nasional TPB, dan Rencana Aksi Sub-Nasional TPB.

COP 24 Polandia

Misi Delegasi DPR RI mengikuti sidang *Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations Climate Change Conference (COP 24)* adalah untuk memperdalam pengetahuan terkini mengenai isu-isu utama COP 24, mendiskusikan mengenai *IPU's Parliamentary Action Plan on Climate Change*, berinteraksi dengan para ahli dan negosiator UNFCCC, dan mengeksplorasi penganggaran dan pembuatan undang-undang untuk mendukung *Paris Agreement*. Kehadiran Indonesia dalam *Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations Climate Change Conference (COP24)* memiliki nilai strategis baik dalam penguatan hubungan bilateral DPR RI dengan negara-negara anggota IPU maupun dalam kerangka kerja sama multilateral antar parlemen IPU. Pada penutupan *Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations Climate Change Conference (COP24)*, telah disepakati *Outcome Document* yang antara lain menekankan dukungan legislatif bagi upaya yang lebih keras lagi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Laporan IPCC menyadarkan kita akan keniscayaan skenario kenaikan suhu global abad ini harus dijaga jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industrialisasi, sambil mengejar upaya untuk membatasi suhu meningkat lebih jauh hingga 1,5°C. Untuk tujuan ini, emisi gas rumah kaca global harus berkurang dan dinetralkan. Implementasi penuh dari Perjanjian Paris menjadi tanggung jawab bersama semua negara berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda sesuai prinsip *common but differentiated responsibility*.



Ibu Siti Hediati memimpin Pertemuan dengan Parliamentary Friendship Group of the House of Representatives of New Zealand

BAGIAN LIMA



BEST PRACTICES





Foto bersama Delegasi DPR-RI



LUAR NEGERI

TIGA TAHUN telah berselang sejak pengesahan TPB sebagai agenda pembangunan global di Sidang Umum PBB di New York 2015 silam. Para pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional hingga global berpacu mengimplementasikan tujuan, target, dan indikator TPB di berbagai sektor hingga tahun 2030. Dalam hal pencapaian TPB, kemitraan dan kolaborasi di tingkat bilateral maupun multilateral dibutuhkan untuk memecahkan tantangan dan mencari solusi terbaik.

Selaku penjurur (*focal point*), Panja TPB BKSAP DPR RI berupaya memperkaya khazanah praktik dan pengalaman TPB dengan mengadakan kunjungan kerja ke negara-negara tertentu yang dinilai mempunyai keunggulan komparatif. Pada tahun 2018, Panja TPB berkesempatan mengunjungi dua negara: New Zealand dan **Kazakhstan**.

Kedatangan BKSAP DPR RI ke New Zealand dan Kazakhstan membawa misi diplomasi parlemen bertemu dengan para pemangku kepentingan di New Zealand dan Kazakhstan guna saling bertukar pikiran, pandangan, pengalaman dan praktik cerdas terkait implementasi TPB baik di Indonesia maupun New Zealand.

Selain itu, kunjungan BKSAP DPR RI juga mengeksplorasi upaya Parlemen New Zealand dan Parlemen Kazakhstan dalam memantau implementasi nasional TPB dan dalam menyediakan kebijakan yang tepat dan relevan untuk mendukung TPB.

New Zealand

New Zealand sebuah negeri di ujung Selatan menerapkan *good governance* dalam mengelola pemerintahan. Bahkan konsep tersebut dipandang sebagai kemestian



sebagai agenda pemerintah. New Zealand terkenal sebagai negara dengan sumber daya alamnya juga kualitas lingkungan yang baik dan telah memperoleh reputasi “hijau” di tingkat internasional. Sungguh pun demikian, sebetulnya konsep TPB bukanlah konsep yang familiar dalam masyarakat dan pemangku kepentingan di New Zealand. Secara historis, New Zealand hanya mengenal dan mengimplementasikan pembangunan hijau.

Dalam konteks *good governance*, sistem parlementer sangat bisa dipertanggungjawabkan dan terpercaya. Parlemen sebagai representasi rakyat mempunyai banyak *select committee* (komisi) yang dibentuk untuk mengawasi bidang-bidang pemerintahan. Masyarakat luas dapat mengajukan kritik dan saran atas suatu perundang-undangan. Komite kemudian akan memproses sebagai laporan dari masyarakat.

Dalam mengukur pembangunan, New Zealand menerapkan kerangka kerja standar hidup dengan menggunakan indikator berupa: data yang valid, kapital sosial, dan infrastruktur. Dari indikator itulah New Zealand menyiapkan penganggaran dan kebijakan nasional untuk periode berikutnya.

Dalam hal energi, New Zealand menganjurkan rakyatnya untuk menggunakan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya yang ramah lingkungan. New Zealand memang tidak memiliki instalasi pembangkit tenaga nuklir. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan yang melarang penggunaan tenaga nuklir dikarenakan New Zealand adalah negara yang bebas nuklir.

Pemerintah New Zealand saat ini berfokus pada pengelolaan sumber daya air dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Pada 2017, New Zealand baru saja mengadopsi kebijakan air tawar nasional yang bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas air bersih. Dalam Laporan Kinerja Lingkungan OECD 2017, New Zealand disebutkan berupaya memastikan kebijakan air tawar yang akan membantu mengurangi ketidakpastian investasi dan risiko tekanan lebih lanjut pada sumber daya air tawar dan ekosistem. New Zealand juga mengembangkan tenaga air dikarenakan sumber daya air yang melimpah. New Zealand juga tengah mengembangkan tenaga angin dengan memanfaatkan fungsi baling-baling dan kincir. Bersama dengan 27 negara lainnya, New Zealand tergabung dalam negara yang berkomitmen menggunakan *eco-culture* untuk menekan emisi gas rumah kaca. Salah satu misi yang diemban negara *eco-culture* adalah menekan bahan bakar fosil.



New Zealand menempati peringkat 20 dengan skor indeks 77,6 menurut Indeks Global TPB (the Global SDG index).³ Menurut Indeks, New Zealand kemungkinan besar mencapai TPB No Poverty, Good Health and Well-being, *Quality Education, Affordable and Clean Energy, and Sustainable Cities and Communities*. Namun, New Zealand juga masih jauh dari pencapaian *SDGs Zero Hunger, Climate Action, Life Below Water and Life on Land*.⁴ Sementara itu, Environmental Performance Index and Human Development Index (HDI) New Zealand pada tahun 2016, menurut laporan, juga menempati peringkat 20 teratas dari 157 negara di seluruh dunia.

New Zealand menunjukkan komitmen pada masalah degradasi lingkungan dengan mengadopsi Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya (*The Resource Management Act*) 1991 yang merupakan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum dalam mempertahankan lingkungan dan menjadi hukum pertama dalam prinsip keberlanjutan. Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya (RMA) 1991 adalah undang-undang utama New Zealand yang menetapkan bagaimana kita harus mengelola lingkungan kita dan diciptakan untuk mencapai pendekatan yang lebih terkoordinasi, efisien, dan komprehensif untuk pengelolaan lingkungan.⁵ Pada 1 Februari 2013, Pemerintah New Zealand telah merilis Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan (*the Sustainable Development Programme of Action*). Program ini menyediakan seperangkat tujuan dan prinsip pemandu untuk kebijakan dan pengambilan keputusan di seluruh sektor pemerintah.

Dalam hal listrik, total konsumsi listrik di New Zealand mencapai hampir 39.000 gigawatt jam (GWh). Sekira 32% dari angka tersebut dikonsumsi oleh konsumen perumahan. Lebih dari 40% dari total energi New Zealand berasal dari sumber daya terbarukan. Sebagian besar ini digunakan untuk menghasilkan listrik,⁶ dengan peningkatan pasokan hingga 85% dari 2016.⁷ Energi hidro menyumbang lebih dari separuh dalam memasok listrik negara. New Zealand juga terkenal karena kemajuannya dalam mengembangkan energi panas bumi. Ini menyediakan 22% dari total pasokan energi primer New Zealand, termasuk lebih dari 17% listrik. New Zealand juga memanfaatkan energinya dari energi angin, bioenergi, matahari dan laut.⁸ Selanjutnya, pada tahun 2016, 40% pasokan energi New Zealand bersumber dari

3 Jeffrey Sachs et.al., *SDGs Index and Dashboard Report 2017 Global Responsibilities International Spillovers in Achieving the Goals*, (New York, Bertelsman Stiftung and Sustainable Development Solution Network (SDSN), 2017), hlm. 10.

4 <http://sdsnyouth.org/>

5 <http://www.mfe.govt.nz/more/acts-and-regulations/resource-management-act-1991>

6 <https://www.eeca.govt.nz/energy-use-in-new-zealand/renewable-energy-resources/>

7 <http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/energy-in-new-zealand/documents-images/energy-in-nz-2017.pdf> page 43.

8 www.eeca.govt.nz



energi terbarukan. Hal itu menjadikan New Zealand sebagai pangsa terbarukan tertinggi ke-4 di negara-negara OECD.⁹

Yang penting untuk digarisbawahi dalam pelaksanaan TPB di New Zealand adalah pendekatan sains dan teknologi. Tenaga geotermal adalah contoh terbaik bagaimana sains dan teknologi memimpin dalam upaya eksplorasi energi terbarukan. GNS Science adalah pionir dalam pengembangan energi geotermal. Pengembangan ini berasal dari ilmu bumi yang dikembangkan di New Zealand sejak dekade 1950-1960. GNS Science mengintegrasikan semua data dan sumber daya untuk memahami sistem geotermal sebelum memutuskan memanfaatkan energi panas bumi untuk listrik, pertanian, pengairan, dan lain-lain. New Zealand dalam mengembangkan geotermal ini telah menghabiskan dana investasi tinggi serta memberikan banyak insentif bisnis membangun kawasan terpadu geotermal. Sejumlah 84 persen energi New Zealand memanfaatkan energi terbarukan yang bersumber dari geotermal dan tenaga air.

Kunci sukses pengembangan geotermal di New Zealand terletak pada tiga hal: (1) pendanaan pemerintah untuk riset inovasi produk unggulan dan berbasis pemecahan masalah; (2) fasilitas dan peralatan teknologi yang memadai; dan (3) hubungan antara kalangan industri dan ilmuwan yang terjalin solid dan saling menguntungkan. Selain itu, New Zealand juga mengembangkan (1) sistem komprehensif untuk menggali pemahaman baru; (2) monitor terhadap dampak lingkungan; (3) dukungan laboratorium untuk membuat model; (4) database geotermal; (5) pemecahan masalah dengan eksperimen kimia; (5) pengolahan limbah menjadi potensi ekonomi; dan (6) pendidikan, training, dan workshop.

New Zealand sangat berkepentingan terhadap komunitas rural dan urban untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap konflik dan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah New Zealand menyediakan infrastruktur seperti transportasi yang memadai untuk memajukan kesejahteraan warga. Pemerintah New Zealand memberlakukan syarat analisis dampak lingkungan untuk sebuah pengerjaan eksplorasi. Syarat itulah yang harus dibuktikan bahwa pengerjaan suatu proyek aman terhadap lingkungan. Fungsi GNS Science salah satunya memberikan bantuan teknis atas uji lingkungan suatu proyek. Pengembangan riset dan teknologi juga diarahkan untuk pemajuan pertanian warga New Zealand. Misalnya pembangunan teknologi pertanian secara otomatis akan meningkatkan produk pertanian.

Dalam hal perubahan iklim dan mitigasi bencana, otoritas New Zealand menerapkan pendekatan sains dan sosial-budaya untuk penanggulangan perubahan iklim dan

9 <http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/energy-in-new-zealand/documents-images/energy-in-nz-2017.pdf>



bencana. Pada intinya, semua pendekatan lintas disiplin diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Satu contoh yang dapat ditarik di sini adalah: Pemerintah New Zealand memberikan konsultasi kepada komunitas lokal tentang dampak negatif tsunami dan bencana lainnya serta cara penanggulangannya. Pemerintah New Zealand juga memanfaatkan kearifan lokal yang ada di komunitas untuk pengembangan mitigasi yang komprehensif. Satu hal yang menarik dicatat dari implementasi pembangunan berkelanjutan adalah New Zealand menggunakan dua sudut dalam pengambilan kebijakan publik: yang pertama sains memimpin debat dan diskusi publik terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah implementasi kebijakan publik diberlakukan berdasarkan sains dan riset mendalam. Dampaknya adalah sebuah kebijakan publik teruji secara ilmiah.

Dalam hal legislasi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, beberapa undang-undang New Zealand patut dicatat: per 1 Juli 2017 the Building (*Earthquake-prone Buildings*) Amendment Act 2016 mulai berlaku. Undang-undang ini memperlihatkan cara kerja untuk memastikan bangunan Selandia Baru dikelola untuk tahan gempa bumi di masa depan. Selain itu, Komite Lingkungan Parlemen Selandia Baru mengusulkan "*Litter (Increased Infringement Fee) Amendment Bill*" atau "RUU Amandemen Sampah (Peningkatan Biaya Pelanggaran)". RUU ini terutama tentang meningkatkan denda maksimum untuk pelanggaran dari NZD 400 menjadi NZD 1.000 sehingga ada pencegah yang lebih besar agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

Kazakhstan

Kazakhstan adalah negara yang terletak di Central Eurasia. Negara ini merupakan salah satu dari lima negara Asia Tengah, dengan luas lahan 2,7 juta kilometer persegi.

Kazakhstan adalah salah satu negara penghasil emisi terbesar di Eropa dan Asia Tengah, dengan sektor energi mencatat 82% dari total emisi, diikuti oleh pertanian dan proses industri. Lebih dari 80% listrik yang diproduksi di Kazakhstan adalah batu bara, diikuti oleh gas alam dan tenaga air. Dalam *National Determined Contribution* (NDC), Kazakhstan mengusulkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 15% dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Menyadari akan hal di atas, baru-baru ini, Kementerian Energi Kazakhstan meluncurkan platform online untuk memantau, melaporkan dan memverifikasi sumber emisi dan gas rumah kaca (GRK). Platform ini adalah komponen penting dari sistem perdagangan emisi nasional Kazakhstan (ETS), yang diluncurkan pada tahun 2013, dan merupakan yang pertama dari jenisnya di Asia Tengah.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa pada kenyataannya setengah dari target TPB berada dalam kesesuaian dengan tujuan nasional Kazakhstan yang ditentukan dalam Strategi



Kazakhstan 2050 dan 100 Aksi Nyata. Oleh karena itu, Kazakhstan adalah salah satu mitra Kelompok Kerja yang paling strategis untuk bertukar pengetahuan terbaik tentang SDG dan hal-hal terkait.

Tujuan keseluruhan dari Proyek Pembangunan Nasional Kazakhstan adalah untuk berkontribusi pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan terhadap lingkungan dan ekonomi Kazakhstan melalui transisi ke model Ekonomi Hijau. Tujuan khusus dari Proyek ekonomi hijau adalah sebagai berikut: (1) Untuk berkontribusi terhadap air yang berkelanjutan kebijakan dan praktik manajemen; (2) Untuk mempromosikan sistem tata kelola lingkungan modern yang bertujuan untuk menghasilkan insentif untuk transisi ke model Ekonomi Hijau dengan fokus pada sumber daya air dan perubahan iklim; (3) Untuk mempromosikan sumber daya air dan perubahan iklim.

Proyek energi bersih yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kazakhstan adalah listrik hijau. Penghijauan sektor listrik didasarkan pada pengembangan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon dioksida di sektor energi dan gasifikasi negara. Sekitar 1,1 miliar kilowatt jam energi hijau diproduksi pada tahun 2017 dan 138 megawatt energi terbarukan diharapkan akan diperkenalkan tahun 2018.

Pemerintah Kazakhstan mengumumkan transformasi ekonomi yang berpusat pada pembangunan berkelanjutan, investasi asing yang lebih besar, dan dorongan ke arah energi terbarukan. Hal ini mengingat kenyataan bahwa sejak kemerdekaan, ekonomi Kazakhstan telah didorong oleh industri ekstraktif, dengan perhitungan minyak sebesar 50 persen dari PDB negara itu pada tahun 2017. Duduk di cadangan minyak terbukti terbesar ke-11 di dunia, alam Kazakhstan yang berlimpah kekayaan sumber daya telah menjadi kunci untuk perkembangan yang cepat dan pengayaan negara.

Kazakhstan mengadopsi *Green Bridge Initiative* yang menargetkan konservasi di lima sektor:

- 1) Ekosistem pegunungan dan lahan basah,
- 2) Energi bersih dan berkelanjutan (ketersediaan dan efisiensi),
- 3) Ketahanan pangan,
- 4) Infrastruktur dan transportasi perkotaan,
- 5) Adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Kazakhstan tengah mengembangkan Energi Baru Terbarukan:

- 1) Water resources
- 2) Solar power stations – 290 MW;
- 3) Wind power stations – 620 MW;
- 4) Hydroelectric power stations – 75 MW;



5) Bio ES – 15 MW.

Selanjutnya, Pemerintah Kazakhstan telah meluncurkan “Kazakhstan-2050”. Strategi ini menguraikan serangkaian reformasi tonggak bersejarah di semua bidang kehidupan bangsa. Strategi ini membuat semua aspek perencanaan publik menjadi lebih ramah lingkungan dan terintegrasi, dan menerjemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tujuan-tujuan tertentu di Kazakhstan.

Upaya partisipasi publik yang luas patut dicatat dari praktik cerdas Kazakhstan. Dalam upaya ini, *the committee on Statistics of the Ministry of National Economy* Republik Kazakhstan membentuk kelompok kerja lintasdepartemen pada pemantauan TPB dengan partisipasi masyarakat sipil, LSM, lembaga penelitian, sektor swasta dan badan-badan PBB lainnya. Proyek kerja yang dilakukan *the Committee on Statistics* adalah melakukan sejumlah kegiatan, termasuk di bidang statistik pertanian dan lingkungan dengan dukungan berbagai badan PBB (FAO, UNECE, UNEP). Di samping itu, *the Committee on Statistics* menyelenggarakan pertemuan teknis nasional pertama tentang statistik TPB dengan partisipasi semua pemangku kepentingan.

Terkait data statistik, *the Committee on Statistics* bekerjasama dengan Kelompok kerja lintasdepartemen melakukan kerja bersama dalam menyusun (1) penilaian kesiapsediaan sistem statistik nasional untuk menghasilkan indikator TPB; (2) mengidentifikasi keselarasan indikator TPB global untuk menyusun prioritas nasional; (3) menyusun indikator nasional; dan (4) menyiapkan konsep sistem indikator untuk pemantauan TPB (lebih dari 300 indikator, 70 di antaranya bersifat nasional). Yang sekarang sedang digalakkan adalah menyelenggarakan pelatihan—bersama dengan UN-Women—untuk Masyarakat sipil dan media tentang TPB yang terkait dengan gender.

DALAM NEGERI

Tahun 2018 merupakan tahun implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Mengingat pentingnya peran parlemen dalam implementasi TPB, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) demi melanjutkan tugas-tugas yang ada di dalam agenda pembangunan sebelumnya (*Millenium Development Goals*).

Salah satu program Panja TPB adalah memastikan kesiapan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dalam mengimplementasikan TPB dalam agenda pembangunan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Panja TPB secara berkala mengadakan kunjungan ke daerah untuk bertemu dan mengadakan dialog, tukar pikiran serta menyerap aspirasi



dengan masyarakat di daerah yang terdiri dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, LSM, pelaku bisnis, kampus dan pers. Kunjungan daerah merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi DPR RI untuk memastikan kesiapan daerah dalam implementasi TPB di daerah. Kunjungan daerah Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2018 diarahkan ke Aceh, provinsi paling barat di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Utara, provinsi di utara Indonesia.

Provinsi Aceh

Perumusan pembangunan daerah Provinsi Aceh termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh yang beririsan dengan tujuan, target, dan indikator TPB. RPJMD Aceh merupakan produk musyawarah Pemerintah Provinsi dengan semua lapisan masyarakat yang dicetuskan dalam FGD, rapat dengar pendapat, dan penelitian kampus. RPJMD merupakan kebutuhan Aceh yang mesti direalisasi dalam jangka lima tahunan. Dilihat dari proses penyusunannya, RPJMD menerapkan inklusivitas dan partisipasi publik. Untuk menerjemahkan TPB dalam konteks lokal Aceh, pembangunan Aceh diarahkan menuju keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan yang arahnya tidak merusak lingkungan. Fokus pembangunan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Parameter ukuran masyarakat miskin diukur dengan tiga hal: air bersih, hidup layak, dan infrastruktur.

Program PKK digagas untuk pemberdayaan perempuan. Kader PKK diarahkan untuk penghijauan mewujudkan Aceh Green. Program lainnya adalah penanaman pohon. Untuk pemberdayaan ekonomi, kader-kader PKK Aceh mengadakan penyuluhan kerajinan tangan dan penggunaan sampah.

Secara bentang alam, 62 persen wilayah Aceh terdiri dari hutan yang luasnya mencapai 3.775 juta hektar. Hutan itu terdiri dari taman nasional dan taman margasatwa. Untuk wilayah Sumatra Aceh mempunyai 23 persen tutupan hutan se-Sumatra. Yang paling terkenal adalah Taman Nasional Leutzer seluas 1.94 ribu dan telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dunia dari UNESCO.

Pemerintah Provinsi Aceh mengembangkan energi baru dan terbarukan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Potensi tenaga air dan geotermal untuk pembangkit listrik kini tengah dikembangkan di Aceh. PLTA direncanakan menghasilkan 2560 Megawatt. Sementara itu, tenaga geotermal dikembangkan di Gunung Seulawah yang menghasilkan 165 MW, dan Gunung Jaboy sebesar 80 MW. Di samping itu, Aceh mempunyai tiga gunung api tipe A yang rawan gempa bumi.

Aceh mempunyai garis pantai mencapai 2,600 km. Kondisi ini membawa potensi perikanan tangkap. Bahaya yang datang di sektor ini adalah illegal fishing yang dilakukan



negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Tiongkok. Mulai 2018 pengawasan perairan laut Aceh mulai dilakukan lewat udara

Kota Banda Aceh – Menuju Kota Ramah Gender. Program ini beririsan dengan #TPB1; TPB5; TPB10. Selain dikenal sebagai serambi Makkah, sejak 2007 Kota Banda Aceh juga mulai dikenal sebagai Kota Partisipasi Perempuan di Indonesia. Pemerintah kota Banda Aceh meluncurkan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) sebagai suatu mekanisme partisipasi bagi khususnya kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan. Ini adalah sebetulnya afirmative action. Empat kriteria Musrena: kesetaraan melalui training leadership, sosialisasi (narkoba dan KDRT), gampong ramah anak, dan lintas sektor melalui pemberdayaan ekonomi dan industri rumahan.

Indeks Pembangunan Manusia Aceh berada pada posisi 70 (menunjukkan posisi menengah ke atas).¹⁰ Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Aceh menciptakan daerah transmigrasi bagi kaum dhuafa dengan pembangunan sarana perumahan beserta sanitasi air bersih. Pada tahun 2019, Pemprov Aceh menargetkan 100 persen pelayanan air bersih. Kini sedang dikembangkan 7 PDAM di 3 kabupaten dan kota. Dalam pada itu, Pemprov Aceh menganggarkan 3 triliun rupiah atau sekitar 20 persen dari APBD, sementara anggaran kesehatan dianggarkan 10 persen dari APBD.

Menarik dicatat adalah beberapa program Pemerintah Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang beririsan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di antaranya adalah:

- 1) **Seujahtra JKA Plus.** Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat. #SDG3
- 2) **Aceh Carong.** Menghilangkan gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan, sehingga menghasilkan strategi dan aksi pembangunan sumberdaya manusia. #SDG4
- 3) **Aceh Energi.** Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. #SDG7
- 4) **Aceh Meugoë dan Meulaôt.** Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. #SDG1, SDG2, SDG14
- 5) **Aceh Troe.** Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri. #SDG1, SDG2,
- 6) **Aceh Green.** Pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam. #SDG13
- 7) **Aceh Dame.** Pendidikan damai dimasukkan dalam kurikulum sekolah. #SDG4, SDG16

¹⁰ <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/454/indeks-pembangunan-manusia-aceh-tahun-2017.html>



Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya serius dengan melakukan berbagai perubahan dalam menorehkan berbagai kemajuan pembangunan yang sejalan dengan tujuan pencapaian TPB. Beberapa Program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bersentuhan langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang: Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kedaulatan Pangan (pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan), Peningkatan Daya Saing Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Mitigasi Iklim. Pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Utara mencapai 71,66. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun 2016.¹¹ Lebih lanjut, jika dilihat dari angka kemiskinan misalkan, mampu dicapai pada angka 7,90 persen, gini ratio sebesar 0,394, sementara angka pengangguran berada pada posisi 6,12 persen. Pencapaian positif tersebut juga mampu diwujudkan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di mana, angka harapan hidup sebesar 71,02 tahun, indeks pembangunan manusia 71,05, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional.

Penerapan program strategis yang dikenal dengan ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) sebagai instrument Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sangat signifikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari 8.90% menjadi 7.90%.

Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Sulawesi Utara mendapat perhatian khusus dalam program OD-SK, yaitu: Angka Harapan Hidup terus meningkat hingga mencapai 71.02 tahun, menurunnya jumlah kasus Gizi Buruk dari 40 kasus di tahun 2016, mampu ditekan hingga 25 kasus di tahun 2017. Di bidang pendidikan, Sulawesi Utara mencatatkan pencapaian mengesankan yakni terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terealisasi Rp.495.983.800.000,00 yang diperuntukan kepada 2.222 SD, 706 SMP, 221 SMA/SMK.

Untuk menggerakkan sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara baik mancanegara maupun domestik. Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejumlah objek wisata yang potensial untuk dikembangkan, antara lain Pantai Paal, Pantai Pulisan, Pulau Gangga, dan Pulau Lihaga. Lokasi ini layak dikembangkan sebagai alternatif lain dari Taman Nasional Bunaken yang sudah lebih dahulu terkenal. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara melalui pintu masuk bandara Sam Ratulangi pada Desember 2017 sebanyak 8.587 orang atau meningkat sebesar 33,48 persen dibanding November 2017 yang berjumlah 6.433 orang. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berpengaruh kepada Tingkat Penghunian

11 <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/403/ipm-sulawesi-utara-tahun-2017.html>



Kamar (TPK) hotel di Sulawesi Utara pada Desember 2017 mencapai 76,26% meningkat 13,74% dibanding TPK November 2017.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini juga terus mematangkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara yang diharapkan dapat mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan di daerah ini.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara juga terus mengembangkan sektor kesehatan. Beberapa program-program yang diprioritaskan yakni peningkatan kesehatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan menular, promosi kesehatan serta kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Sulut juga mengalokasikan anggaran sebesar 40 miliar untuk pembangunan rumah sakit yang ada di berbagai daerah di Sulut.

Pemprov Sulut juga akan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan, karena di bagian perbatasan itu ibarat “Wajah Depan” Sulut. Dan juga untuk memajukan Sulut di bidang pariwisata tentunya harus didampingi dengan pelayanan kesehatan unggulan agar supaya para turis merasa nyaman berada di Sulut.



Berkunjung di Hutan Kota Gampong Tibang, Banda Aceh



Delegasi Panja SDGs di Pemkot Sulawesi Utara



BAGIAN ENAM

SELAYANG PANDANG TPB





MDGs sebagai Inisiatif Awal

ADALAH FAKTA bahwa di akhir abad ke-20 dunia masih dililit kemiskinan terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*). Lantaran itulah mencuat di era 1950-an diskursus 'jebakan kemiskinan' (*poverty trap*) sebagai sebuah ide yang populer yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang terperangkap ke dalam 'jebakan kemiskinan,' yang karena itu dibutuhkan 'dorongan kuat' (*big push*) dalam wujud bantuan luar negeri (*aid*) dan investasi agar negara-negara tersebut dapat 'lepas landas' (*take-off*) menuju peningkatan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Dalam konteks di atas, PBB sebagai wadah negara-negara dunia mengelat KTT Dunia pada September 2000 di New York yang diikuti 189 negara. KTT tersebut mengadopsi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000 berjudul *United Nations Millennium Declaration* sebagai dasar hukum lahirnya deklarasi *Millennium Development Goals* (MDGs) atau kerap disebut Tujuan Pembangunan Milenium. Deklarasi tersebut berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 tujuan MDGs dengan tenggat waktu sampai tahun 2015. Kedelapan tujuan itu adalah: (1) Menanggulangi kemiskinan serta kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua kalangan; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; (8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Setelah 15 tahun MDGs berjalan, akhirnya pada tahun 2015 MDGs resmi berakhir. Berbagai pihak menilai capaian MDGs secara global dianggap masih jauh dari harapan terutama terkait pencapaian target menekan angka kematian ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Situasi tersebut disebabkan antara lain: (1) karena desain MDGs yang bersifat *top down* PBB; (2) lemahnya akses kemitraan yang ditandai komitmen setengah hati sejumlah negara maju untuk merealisasikan tujuan MDGs; (3) meletusnya konflik (seperti negara-negara kawasan Timur Tengah) dan bencana alam serta wabah penyakit menular yang menguras energi dunia internasional.



Sementara evaluasi capaian nasional, Indonesia menghadapi kendala tidak ringan dalam pemenuhan target MDGs. Sekadar misal, perdagangan bebas, kenaikan harga minyak yang memicu subsidi BBM, masalah perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada melambungnya harga bahan pangan, itu semua memengaruhi upaya torehan MDGs nasional.

Laporan pencapaian MDGs oleh Bappenas menyebutkan bahwa dari 67 indikator, 49 indikator berhasil dipenuhi sementara 18 sisanya tidak terpenuhi hingga akhir 2015. Target yang tercapai yaitu:

1. MDG 1, proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari.
2. MDG 3, rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi; dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun.
3. MDG 6, angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian, serta proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan dalam program *Directly Observed Treatment Short Course (DOTS)*.
4. MDG 7, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak di perkotaan.
5. MDG 8, proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler.

Target yang tidak tercapai yaitu:

1. MDG 1, (i) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (ii) Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum.
2. MDG 4, (iii) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; (iv) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup.
3. MDG 5, (v) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
4. MDG 6, (vi) Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi; (vii) Proporsi jumlah penduduk usia 15- 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS.
5. MDG 7, (ix) Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂); (x) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perdesaan; (xi) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perdesaan; (xi) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.
6. MDG 8, (xii) Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB; (xiii) Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi; dan (xiv) Proporsi rumah tangga dengan akses internet.



Keterbatasan dalam pencapaian target MDGs ditengarai disebabkan beberapa hal antara lain: (1) lemahnya komitmen, koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan; (2) tujuan, target dan indikator MDGs diadopsi secara parsial dengan mengesampingkan kebutuhan dan kondisi lokal; (3) perumusan indikator MDGs yang belum memenuhi kriteria inklusif dan partisipatif.

Makna Pembangunan Berkelanjutan?

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah mengemuka sejak beberapa dekade lalu. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kualitas kehidupan dengan tetap berusaha untuk tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup. Definisi pembangunan berkelanjutan berdasarkan Brundtland Report tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future*, menyebutkan “*Sustainable development is development that meets the needs of the presents without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”

Transformasi ke SDGs

Agenda MDGs secara resmi dianggap berakhir dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 26 September 2015. Tercatat 193 negara anggota PBB berpartisipasi dalam sidang tersebut. Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global yang didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tanggal 21 September 2015 tentang *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target serta 241 Indikator itu merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan global baru pengganti MDGs yang terdiri dari lima elemen, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan, untuk mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. SDGs bersifat memberi arah dan panduan dalam pembangunan yang tidak mengikat negara-negara pengadopsi.

Tujuh belas target SDGs adalah: (1) *no proverty* (tanpa kemiskinan); (2) *zero hunger* (tanpa kelaparan); (3) *good health and wellbeing* (kehidupan sehat dan sejahtera); (4) *quality education* (pendidikan berkualitas); (5) *gender equality* (kesetaraan gender); (6) *clean water and sanitation* (air bersih dan sanitasi); (7) *affordable and clean energy* (energi bersih dan



terjangkau); (8) *decent work and economic growth* (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); (9) *industry, innovation and infrastructure* (Industri, inovasi dan infrastruktur); (10) *reduced inequalities* (berkurangnya kesenjangan); (11) *sustainable cities and communities* (penataan kota dan kehidupan berkelanjutan); (12) *responsible consumption and production* (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab); (13) *climate change* (penanganan perubahan iklim); (14) *life below water* (ekosistem lautan); (15) *life on land* (ekosistem daratan); (16) *peace, justice and strong institutions* (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh); (17) *partnership for the goals* (kemitraan untuk mencapai tujuan).

SDGs dirancang secara partisipatif yang berbeda dari pendahulunya *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan pihak-pihak relevan lainnya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap perumusan Tujuan dan Target SDGs.

Adalah 'Tidak Meninggalkan Satu Orang pun' (*Leave No One Behind*) sebagai prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, pertama, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, dan kedua, Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Komparasi SDGs dengan MDGs

Banyak kalangan optimis bahwa SDGs akan lebih baik daripada MDGs karena terutama dapat dilihat dari proses perumusannya. Bila MDGs dibuat di New York oleh negara anggota OECD dan beberapa lembaga internasional seperti PBB tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga, lain halnya dengan SDGs yang dirumuskan melalui proses partisipatif dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan melalui survei warga. Salah satu survei yang dilaksanakan adalah melalui *Myworld online survey* untuk mengumpulkan pandangan masyarakat tentang apa yang penting bagi mereka dan dunia seperti apa yang mereka inginkan.

SDGs berlaku secara universal, tidak hanya untuk negara maju dan negara berkembang tetapi juga negara-negara berpenghasilan rendah. SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah yang wajib diatasi. Setiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan, tidak hanya mengandalkan bantuan dari negara maju tetapi juga melibatkan sektor swasta. Lain halnya dengan MDGs, dimana negara miskin dan berkembang lah yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara negara maju memberikan dukungan dengan penyediaan dana.



Salah satu perubahan mendasar yang diusung SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan” (*Leave No One Behind*). Ini tercermin dari indikator-indikatornya yang memberikan kesempatan bagi keterlibatan masyarakat sipil. SDGs adalah program inklusif yang secara spesifik menyasar kepada mereka yang cacat dan rentan. SDGs juga menekankan kesetaraan antarnegara dan antarwarga negara dengan didukung dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Hal ini berbeda dengan MDGs yang tidak memiliki standar dasar HAM. MDGs dinilai gagal memberikan prioritas keadilan yang merata sehingga memicu munculnya diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang berujung pada masih banyaknya masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan.

Berikut komparasi SDGs dengan MDGs:

MDGs–2000–2015	SDGs–2015–2030
<p>50 persen Target dan sasarannya adalah separuh mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya.</p>	<p>100 persen Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengakhiri kemiskinan.• 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran.• Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
<p>Dari negara, untuk negara berkembang MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p>	<p>Berlaku universal SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p>
<p>Dari Atas (top down) Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.</p>	<p>Dari Bawah (bottom up) dan partisipatif Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.</p>
<p>Solusi parsial atau tumbal sulam 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan.</p>	<p>Solusi yang menyeluruh Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem</p> <ul style="list-style-type: none">• Kesetaraan gender.• Tata pemerintahan.• Perubahan model konsumsi dan produksi.• Perubahan sistem perpajakan.• Diakuinya masalah ketimpangan.• Diakuinya masalah perkotaan.



Aktor-aktor Krusial SDGs

Dalam hal pelaksanaannya, SDGs memang tidak bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*), akan tetapi karena merupakan hasil kesepakatan bersama para pemimpin negara, agenda ini menjadi penting adanya dan mengikat secara moral bagi tiap negara untuk melaksanakannya dengan bertanggungjawab. Untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada tahun 2030, diperlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik pemerintah dan **parlemen**, filantropi dan bisnis, akademisi dan pakar dan media massa dan civil society.

Secara lebih spesifik, pihak 1 (pemerintah dan parlemen) memiliki tanggung jawab membuat regulasi/peraturan, hal dimaksud dapat diwujudkan melalui komitmen politik dan keberpihakan anggaran; memperkuat kerja sama global, khususnya akses partnership serta meningkatkan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga, sinergi hubungan pusat dan daerah. Semestinya benturan agenda politik (pemilu dan pilkada) atau perbedaan sikap partai politik (presiden-gubernur-bupati/wali kota) tidak meminggirkan fokus pemerintah.

Pihak 2 (filantropi dan bisnis) memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat, khususnya pendanaan, khususnya Filantropi (donatur/kalangan dermawan) dengan aksi kemuliaan di bidang sosial. Di harapkan kedepan bisa terwujud sinergi dan kebersamaan dalam advokasi dan peningkatan kapasitas program pemberdayaan di setiap daerah (minimal di level desa) secara menyeluruh.



Pihak 3 (akademisi dan pakar) mesti berperan dengan memberi masukan kepada pemerintah pusat ataupun daerah/kabupaten/kota; menyederhanakan SDGs ke bahasa rakyat (bahasa local) agar mudah dipahami serta menyosialisasikan ke publik. Civitas akademika juga perlu memahami, bahkan memasukkan isu SDGs 2030 ke mata kuliah atau kajian-kajian di kampus guna mempersiapkan mahasiswa/i dalam menghadapi tantangan, sekaligus mampu membaca peluang dalam transformasi global dimaksud.

Sejumlah fakta menunjukkan pemanfaatan kemajuan teknologi, generasi muda lebih dominan mengakses entertainment (game dan media sosial), bahkan hal miris situs porno. Sangat sedikit yang mengakses konten pendidikan (apalagi konten SDGs) untuk mempersiapkan diri guna menemukan peluang di dunia nyata.

Pihak 4 (media massa dan civil society) berperan sangat vital memberi pemahaman kepada publik, diseminasi dan monitoring dalam mewujudkan SDGs 2030. Pengalaman MDGs 2015, Pemerintah kadangkala mengalami kendala menjalin mitra (NGO/INGO serta lembaga donor lainnya), sementara LSM di Tanah Air justru lebih mudah bermanuver dengan program nyata tanpa benturan birokrasi/regulasi. Tentunya modal trust (kepercayaan) dimaksud harus bisa dioptimalkan ke depan dalam mewujudkan SDGs 2030.

Penutup

Upaya percepatan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya nasional, regional, dan global. Peran dan kontribusi semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, mereduksi hambatan-hambatan, mendukung mobilisasi sumber daya dan membangun sinergi untuk perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* serta evaluasi yang lebih baik. Koordinasi yang efektif antarpelaku pembangunan perlu terus dioptimalkan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan.



BAGIAN TUJUH



**GALERI
FOTO**



Chair of WPFSD menandatangani Bali Commitment pada sidang The 2nd WPFSD



Delegasi berfoto bersama dengan Director of Geological and Nuclear Sciences New Zealand



Pertemuan delegasi DPR-RI dengan Geological and Nuclear Sciences New Zealand



Pertemuan Delegasi DPR-RI dengan Duta Besar RI untuk Wellington beserta jajarannya di KBRI Wellington



Pertemuan delegasi BUSAP DPR RI dengan Duta Besar RI untuk Kazakhsatan dan ASEAN



Delegasi Panja TPB BKSAP melakukan kunjungan ke Aceh



Inspeksi delegasi Panja TPB BKSAP ke Hutan Kota Aceh



Pertemuan Delegasi Panja TPB BUSAP DPR RI dengan Sekretaris daerah Aceh



Delegasi Panja TPB BUSAP DPR RI berfoto bersama di Sekolah SMK Negeri I Manado



Delegasi Panja TPB BUSAP DPR RI juga mengunjungi Sekolah SMK Negeri I Manado



Ketua Panja TPB BKSAP disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE



Ketua Panja TPB BKSAP disambut oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (The House of Representatives of the Republic of Indonesia) is the legislative body of Indonesia. The 1945 National Constitution of Indonesia stipulated that Indonesia has a unicameral system of parliament. Indonesia adopts a strict division between legislative, executive, and judicative; in which the legislative is mandated to perform the core democratic role of legisating, budgeting and oversight.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia is an elected legislative with proportional system and parliamentary threshold. The current term inaugurated on 1 October 2014, consists of 560 members of parliament from 10 political groupings for the period of five year term.

To execute its mandates, the House of Representatives has 11 commissions and 5 standing committees. A large part of the work of the House takes place in commissions. These commissions debate legislations, consider policy issues, scrutinize the work and expenditure of the government, examine proposals and determine budgets.



The House of Representatives of the Republic of Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270 – Indonesia





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270

 +6221 5715 813, 5715 835, 5715 837, 5715 841

 +6221 5732 132

 biro_ksap@dpr.go.id

 wpfsd.org

dpr.go.id